

3.1.3.9. Sekretariat DPRD

Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 telah doalokasikan anggaran sebesar Rp. 182.793.453.342 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 168.368.606.081 ,- atau 92,11 % dan realisasi fisik sebesar 97 %, urusan tersebut dilaksanakan melalui 2 Program, 16 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program Pendukung
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A -80,01	BB -79,08	98,84%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	91,34	92,61	101,39%	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2. Capaian Kinerja Urusan Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran.

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	85%	100%	219.627.900	218.148.400	99,33%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	85.054.900	83.920.400	98,67%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	100%	43.258.000	42.913.000	99,20%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%	91.315.000	91.315.000	100,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%	12.620.454.300	12.159.673.468	96,35%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang	89 Orang	100%	11.454.765.800	11.099.572.968	96,90%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	10.000 dokumen	10.000 Dokumen	100%	1.020.977.500	915.389.500	89,66%

	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	144.711.000	144.711.000	100,00%
3	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi BMD	100%	100%	100%	523.012.581	497.254.424	95,08%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	502.144.581	491.026.424	97,79%
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	20.868.000	6.228.000	29,84%
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	50%		7.322.380.922	6.718.395.636	91,75%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%	76.621.900	76.621.900	100,00%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	56.406.140	56.351.140	99,90%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	995.436.791	809.238.772	81,29%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	100%	1.092.367.660	949.762.055	86,95%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100%	551.240.731	489.243.675	88,75%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	22 Dokumen	22 Dokumen	100%	399.335.000	377.350.800	94,49%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	106 Laporan	106 Laporan	100%	1.164.262.500	1.015.046.500	87,18%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan	664 Laporan		2.323.160.200	2.314.336.494	99,62%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	625 dokumen	259 Dokumen		20.050.000	18.240.000	90,97%

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	643.500.000	612.204.300	95,14%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuai dengan perencanaan	100%	50%		6.172.651.199	6.109.623.008	98,98%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 unit	4 unit	100%	3.293.500.000	3.293.500.000	100,00%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	875.546.271	847.787.852	96,83%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	107 Unit	79 Unit	100%	1.601.496.598	1.574.980.170	98,34%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%	73.005.400	73.005.400	100,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-		-	-	0,00%

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%	329.102.930	320.349.586	97,34%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50%		15.283.121.618	14.382.277.368	94,11%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	47.500.000	45.120.000	94,99%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	2.805.038.640	2.416.559.957	86,15%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Unit/ Laporan	24 Unit/ Laporan	100%	1.415.388.616	1.284.270.986	90,74%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	100%	11.015.194.362	10.636.326.425	96,56%

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	50%		12.183.795.452	11.605.949.029	95,26%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	100%	151.500.000	147.134.979	97,12%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	64 Unit	100%	973.338.000	870.602.373	89,45%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	400 Unit	400 Unit	100%	153.500.000	147.776.000	96,27%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	161 Unit	161 Unit	100%	78.790.000	47.645.000	60,47%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	5.022.344.978	4.780.632.620	95,19%

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	4.441.995.223	4.325.891.478	97,39%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit		1.362.327.251	1.286.266.579	94,42%
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	50%		42.698.677.400	42.513.208.927	99,57%
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65/14 Orang/ Bulan	65/14 Orang/ Bulan	100%	41.439.992.400	41.385.673.927	99,87%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	65 Paket	65 Paket	100%	1.060.435.000	1.060.435.000	100,00%
	Pelaksanaan Medical Chek UP DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	22 Orang		198.250.000	67.100.000	33,85%
9	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100%	50%		682.578.600	633.115.232	92,75%
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	65 Dokumen			-	-	0,00%

	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	7 Laporan	100%	99.125.000	64.580.000	65,15%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	24 Laporan	100%	101.700.000	90.998.000	89,48%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	481.753.600	477.537.232	99,12%
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	100%	50%		29.216.222.332	24.282.045.490	83,11%
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1.313.242.200	839.688.937	63,94%
	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dokumen	9 Dokumen		6.164.249.000	3.619.455.297	58,72%
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	9 Dokumen	8 Dokumen		190.896.000	180.566.601	95%
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah	6 Dokumen	2 Dokumen		338.312.000	190.283.650	56,25%

	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	571.370.900	544.892.539	95%
	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	39000 Orang	39000 Orang	100%	20.638.152.232	18.907.158.466	91,61%
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi	100%	50%		4.069.480.700	3.670.805.899	90%
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	583.650.900	561.785.251	96,25%
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	576.981.900	565.163.204	97,95%
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1.764.024.900	1.417.723.459	80,37%
	Pembahasan perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	492.880.300	481.904.490	97,77%
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3.141.700	3.132.000	99,69%

	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	648.801.000	641.097.495	98,81%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persetase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	100%			9.226.100.352	7.296.728.076	79,09%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	3 Laporan	100%	1.388.255.900	1.158.890.728	83,48%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	100%	1.833.232.900	1.357.452.600	74,05%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	3 Laporan	100%	1.879.981.000	1.403.683.900	74,66%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	100%	1.753.408.900	1.356.041.500	77,34%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	3 Laporan	100%	1.692.309.100	1.400.124.400	82,73%

	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 dokumen	2 dokumen	100%	31.069.400	28.614.400	92,10%
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100%	168.100.400	160.160.000	95,28%
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	479.742.752	431.760.548	90,00%
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	100%	50%		11.966.225.344	11.185.326.600	93,47%
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	48 Dokumen	48 Dokumen	100%	2.516.187.924	2.246.990.772	89,30%
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	30 Orang	100%	1.909.246.600	1.885.569.385	98,76%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	100%	545.547.300	545.519.200	99,99%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	499.244.500	461.878.400	92,52%

	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	-		413.939.520	363.197.523	87,74%
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	452 Dokumen	452 Dokumen	100%	6.082.059.500	5.682.171.320	93,43%
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	100%			16.451.682.952	15.346.992.238	93,29%
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	390 Laporan	390 Laporan	100%	27.639.820	26.896.600	97,31%
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	65 Dokumen	65 Dokumen	100%	90.389.450	89.403.450	98,91%
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dokumen	195 Dokumen	100%	16.333.653.682	15.230.692.188	93,25%
6	Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik	100%			400.029.970	314.514.135	78,62%
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 dokumen	2 dokumen	100%	163.563.600	154.881.282	94,69%
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	3 Laporan	100%	236.466.370	159.632.853	67,51%

7	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Alat Kelengkapan Kedewanan	100%			13.757.411.720	11.437.548.151	83,14%
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	7.123.838.000	5.226.817.633	73,37%
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	166.074.000	157.097.800	94,60%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	4 Dokumen		1.491.864.000	1.310.648.941	87,85%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	3.625.610.000	3.402.719.012	93,85%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1.350.025.720	1.340.264.765	99,28%

Dalam melaksanakan program/kegiatan ditemukan permasalahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi dengan Indikator kinerja :

- 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Target 80,01 % (A)) (Realisasi Kinerja 79,08 % (BB)) dengan capaian kinerja 98,84 %.**

Pencapaian target kinerja dari Indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah provinsi dengan outcome :

- 1. Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan target 100%, realisasi 100%.**
- 2. Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi, dengan target 100%, realisasi 100%.**

Capaian Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output 8 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output 16 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output 4 Laporan Evaluasi Kinerja (LAKIP, LPPD, LKPj, Laporan Kinerja Tahunan)**

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output 89 orang ASN dan 4 orang PPPK yang telah dibayarkan gaji dan Tunjangannya serta Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan PPPK yang dibayarkan.**
- **Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD dengan output 13 orang ASN yang mendapatkan honor dan 10.000 dokumen pertanggungjawaban (SPJ).**
- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan output 12 Laporan Keuangan Bulanan.**

(3) Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output 2 dokumen BMD yang di asuransikan.**
- **Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output 12 laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**

(4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output 7 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.**
- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.**
- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan output 3 Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.**
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output 13 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.**
- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output 8 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.**
- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output 22 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.**

- **Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan output 106 Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.**
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output 664 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**
- **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan output 259 Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.**
- **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan output 2 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.**

(5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

- **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output 4 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan.**
- **Pengadaan Mebel, dengan output 2 Paket Mebel yang Disediakan.**
- **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output 79 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.**
- **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output 1 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.**
- **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output (.....) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.**
- **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output 1 Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.**

(6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output 12 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output 12 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output 24 unit/Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output tersedianya 6 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

(7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output 4 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output 47 mobil dan 17 motor / Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
- Pemeliharaan Mebel, dengan output 400 unit Mebel yang Dipelihara.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output 161 unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, terealisasi hanya 60,47 % karena Kurangnya realisasi anggaran pada pemeliharaan Komputer dan Printer disebabkan karena optimalisasi dan efisiensi anggaran serta penghematan tagihan pemeliharaan yang didasarkan pada kondisi Barang Milik Daerah.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output 1 unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output 1 unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output 2 unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas.**

(8) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan sub kegiatan :

- **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, dengan output 65 orang/bulan Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD.**
- **Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dengan output 65 Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan.**
- **Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, dengan output 22 Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD. Terealisasi hanya sebesar 33,85% karena rendahnya animo anggota DPRD untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan tersebut hanya sebatas pemeriksaan saja namun tidak ada tindak lanjut pengobatan/tindakan terhadap diagnosa yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut. Jika ada tindakan lanjutan maka biayanya ditanggung sesuai jaminan kesehatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Selain itu Medical Check Up merupakan salah satu hak DPRD yang harus disediakan anggaran dan pelaksanaannya oleh Sekretariat DPRD meskipun hak tersebut tidak mereka gunakan (ambil), namun Sekretariat wajib menyediakan sesuai jumlah keseluruhan anggota DPRD yang ada. Maka dari itu, tidak jarang anggaran kegiatan ini mengalami sisa yang signifikan pada akhir tahun anggaran.**

(9) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, dengan sub kegiatan :

- **Fasilitasi Fraksi DPRD, dengan output 7 Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD.**
- **Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dengan output 24 Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD,**
- **Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD, dengan output 12 Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan.**

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD :

- 1) Meningkatnya Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Target 90%) (Realisasi Kinerja 91,34%) dengan capaian kinerja 101,39%.

Pencapaian target kinerja dari Indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan outcome :

1. Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi, dengan target 100%, realisasi 100%.
2. Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi, dengan target 100%, realisasi 100%.
3. Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi, dengan target 100%, realisasi 100%.

Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dengan output 1 Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, terealisasi hanya 63,94 % karena Batalnya perjalanan dinas studi banding Pimpinan dan Anggota Bapemperda ke Provinsi Bali yang sebelumnya telah dijadwalkan dalam agenda Bamus pada akhir bulan desember, disebabkan pertimbangan DPRD lebih mengutamakan kunjungan ke daerah bencana untuk membantu secara langsung masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor, selain pertimbangan adanya penetapan tanggap darurat.
- Pembahasan Rancangan Perda, dengan target output 9 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda, terealisasi hanya 58,72 % karena Batalnya pembahasan 3 ranperda yang telah ditargetkan pembahasannya pada perubahan anggaran, disebabkan terlambatnya tim ahli untuk penyelesaian penyusunan draft ranperda yang disertai naskah akademik.

- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, dengan output sebanyak 8 Dokumen Kajian Perundang-Undangan.
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik, dengan output 2 Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi, terealisasi hanya 56,25 % karena Batalnya 1 kali kegiatan seminar ranperda yang berasal dari inisiatif DPRD, disebabkan keterlambatan tim ahli yang telah ditugaskan untuk penyelesaian penyusunan dokumen berupa draft ranperda yang disertai naskah akademik. ranperda dimaksud adalah ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
- Penyusunan Tata Tertib DPRD dengan output 1 Dokumen Hasil Penyusunan Tata Tertib DPRD.
- Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, dengan output 39.000 Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

(2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan sub kegiatan :

- Pembahasan KUA dan PPAS, dengan output 1 Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS.
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan output 1 Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
- Pembahasan APBD, dengan output 1 Dokumen Hasil Pembahasan APBD.
- Pembahasan Perubahan APBD, dengan output 1 Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD.
- Pembahasan Laporan Semester, dengan output 1 Dokumen Hasil Pembahasan Laporan.
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, dengan output 1 Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

(3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sub kegiatan :

- **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, dengan output 3 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.**
- **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, dengan output 3 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, terealisasi hanya 74,05 % karena Penambahan anggaran dihitung mulai bulan September namun dalam pelaksanaan anggaran baru dipakai pada bulan Oktober menunggu APBD Perubahan dan Sisa anggaran juga disebabkan oleh karena Pelaksanaan jumlah hari kegiatan yang ditetapkan di Banmus kurang dari perencanaan di DPA sehingga tidak semua anggaran terealisasi, dan ada sebagian dari pimpinan dan anggota dewan yang tidak mengambil kegiatan kunker dalam daerah sehingga tidak semua anggaran terealisasi.**
- **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan output 3 Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, terealisasi hanya 74,66 % karena Penambahan anggaran dihitung mulai bulan September namun dalam pelaksanaan anggaran baru dipakai pada bulan Oktober menunggu APBD Perubahan dan Sisa anggaran juga disebabkan oleh karena Pelaksanaan jumlah hari kegiatan yang ditetapkan di Banmus kurang dari perencanaan di DPA sehingga tidak semua anggaran terealisasi, dan ada sebagian dari pimpinan dan anggota dewan yang tidak mengambil kegiatan kunker dalam daerah sehingga tidak semua anggaran terealisasi.**
- **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, dengan output 3 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, terealisasi hanya 77,34 % karena Penambahan anggaran dihitung mulai bulan September namun dalam pelaksanaan anggaran baru dipakai pada bulan Oktober menunggu APBD Perubahan dan Sisa anggaran juga disebabkan oleh karena Pelaksanaan jumlah hari kegiatan yang ditetapkan di Banmus kurang dari perencanaan di DPA sehingga tidak semua anggaran terealisasi, dan ada sebagian dari pimpinan dan anggota dewan yang tidak mengambil kegiatan kunker dalam daerah sehingga tidak semua anggaran terealisasi.**

- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam, dengan output 3 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam.
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dengan output 2 Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pengawasan Penggunaan Anggaran, dengan output 1 Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran.
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dengan output 1 dokumen Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

(4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan sub kegiatan :

- Pendalaman Tugas DPRD, dengan target output 48 Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD.
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, dengan output 30 Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli.
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, dengan output 7 orang Tenaga Ahli Fraksi.
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dengan output 12 dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
- Penyusunan Program Kerja DPRD, dengan output (....) Dokumen Rencana Kerja DPRD,
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan, dengan output 452 Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD.

(5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan sub kegiatan :

- Kunjungan Kerja dalam Daerah, dengan output 390 Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD.
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dengan output 65 Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun.
- Pelaksanaan Reses, dengan output 195 Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses.

(6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan sub kegiatan :

- **Penyusunan Kode Etik DPRD, dengan output 2 dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD.**
- **Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan output 3 Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD. Terealisasi hanya 67,51 % karena Efisiensi perjalanan dinas serta pembatasan pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak seluruh anggaran terealisasi**

(7) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, dengan sub kegiatan :

- **Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, dengan output 24 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, terealisasi hanya 73,37 % karena Kegiatan Studi Komparatif Komisi-Komisi tidak dapat dilaksanakan akibat terjadinya bencana banjir dan galodo, serta ditetapkan status Tanggap Darurat di Provinsi Sumatera Barat.**
- **Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, dengan output 1 Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun.**
- **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, dengan output 4 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.**
- **Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, dengan target output 36 Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.**
- **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus, dengan target output 3 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus.**

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.